

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2020



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya jualah dapat disusun sekaligus diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini merupakan media pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pencapaian Visi dan Misi dan sekaligus evaluasi pencapaian kinerja yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya di tahun yang bersangkutan serta kinerja program/kegiatan memuat aspek pengelolaan keuangan, SDM serta sarana prasarana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai sebuah evaluasi pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan, dengan maksud dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja, serta umpan balik perbaikan dimasa-masa mendatang. Segala kekurangan dan keterbatasannya, akan kami sempurnakan di tahun mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP ini adalah bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan penilaian pencapaian kinerja berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, serta pencapaian indikator sasaran tahun 2020. Total alokasi dana SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada APBD Induk sebesar APBD induk sebesar Rp 10.679.998.005,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 13.341.080.577,- (penambahan sebesar Rp 2.661.082.572,-). Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar Rp 12.011.381.795,- atau 90,03% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.329.698.782,- atau 9,70%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, dengan pencapaian fisiknya rata-rata 100%.

Pelaksanaan kegiatan dan program dari rencana kinerja (DPA) tahun 2020 secara keseluruhan dicapai 100% yaitu dari 18 kegiatan yang direncanakan terealisasi sebanyak 18 kegiatan. Program yang direncanakan 6 item dan terealisasi seluruhnya. Dari 5 (lima) indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2020, semua indikator yang capaiannya dalam kategori berhasil dengan persentase capaian 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.3 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	21
3.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan	31
3.4 Analisis Kinerja	34
BAB IV PENUTUP	36

LAMPIRAN

DAFTAR ASET DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwiibawa sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
11. KepMen PAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
16. Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Menurut Peraturan Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

2. Fungsi

Dalam Penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bab XVI bagian kesatu pasal 258, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 3. Seksi Izin Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peningkatan Mutu dan Layanan KUKM;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 85 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 45 orang PNS. Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 40 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 4 orang, SMU sebanyak 9 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS/CPNS) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	4	2	6
3	Sarjana / S1	18	12	30
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	2	3	5
6	SLTA	4	2	6
7	SLTP	1	-	1
JUMLAH		29	19	48

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PHL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana / S1	9	6	15
2	Diploma-III	2	-	2
3	SLTA	16	7	23
JUMLAH		27	13	40

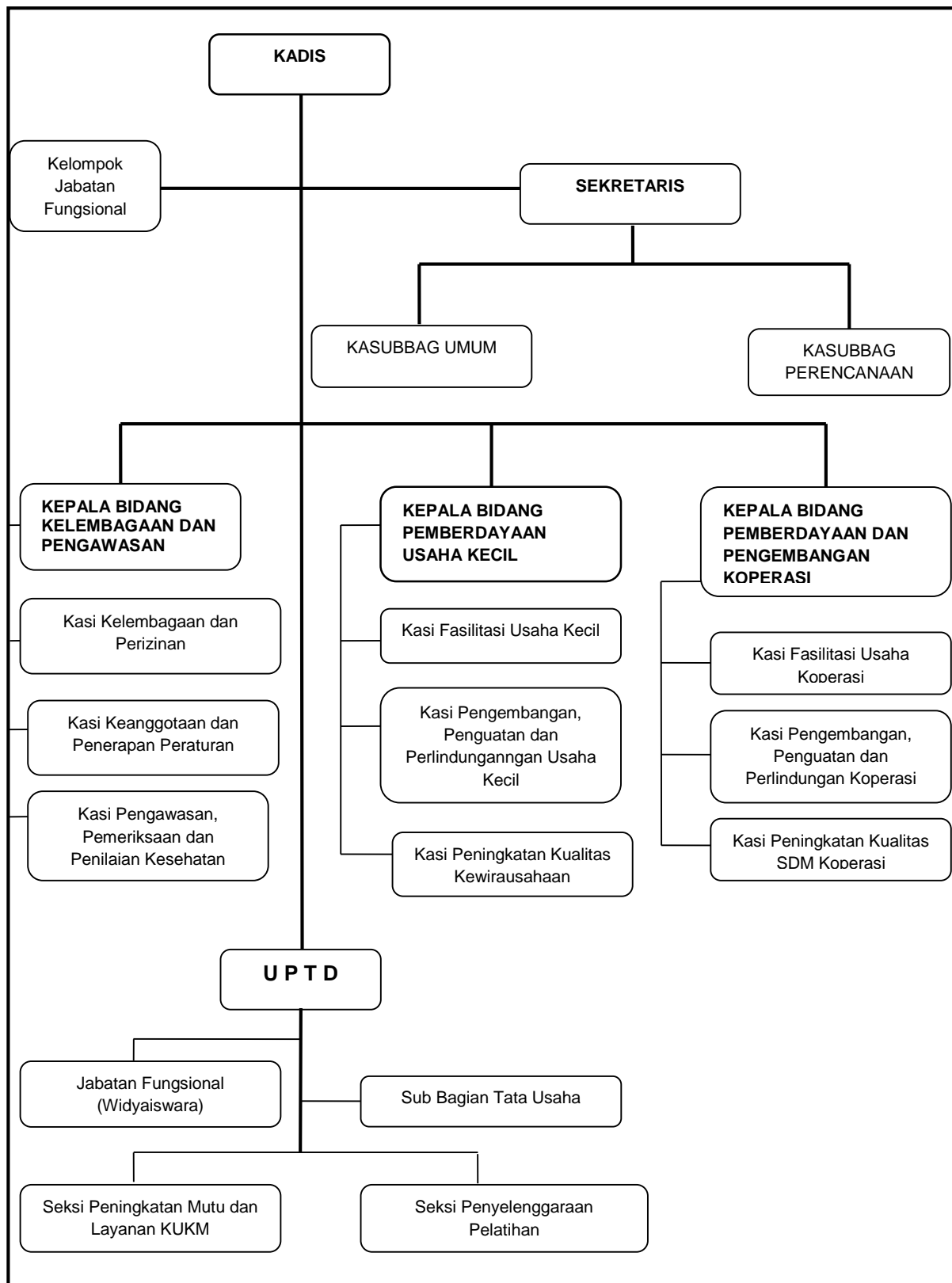
Tabel 1.3 Klasifikasi Eselon Pegawai PNS/CPNS Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	-	1	1
2	II B	-	-	-
3	III A	2	2	4
4	III B	-	1	1
5	IV A	10	3	13
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	10	11	21
8	Fungsional	7	1	8
JUMLAH		29	19	48

Tabel 1.4 Klasifikasi Keadaan Pegawai PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	1	-	-	1
3	SLTA	23	-	5	2	-	30
4	Sarjana Muda	2	-	2	2	-	6
5	Sarjana (S1)	15	-	-	22	7	44
6	Pasca Sarjana	-	-	-	3	4	7
Jumlah		40	-	8	29	11	88

Pengorganisasian pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan melalui bagan struktur organisasi berikut ini :



1.3.3 Aset SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2020 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung aset baik melalui Dana APBD dan Dana APBN (data terlampir).

1.3.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menulis Tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menuliskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Umum, dan Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Bab ini dituliskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan pemmasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin akan timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi aparat pelaksana jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis selama kurun waktu lima tahun yang ingin dicapai, disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini menggunakan analisis SWOT yaitu analisis tentang kekuatan (*strenthgs*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman/tantangan/kendala (*threat*), serta isu-isu strategis. Atas dasar analisa SWOT diperoleh *Critical Faktor Analisis* (CFA) dan dengan memahami CFA ini tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis ditetapkan dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan organisasi.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1.1 TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

2.1.2 SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata;
 - Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga dengan total 15,5 % pertahun

- Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan dengan total target 12,7 % pertahun
 - Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian dengan target 6,6 % pertahun
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
 - a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan dengan target rata-rata 10% pertahun
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4% pertahun
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7% pertahun
 4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
 - a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata dengan total keseluruhan sebesar 2.360,3% dalam kurun waktu 5 tahun;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebanyak 70 produk atau sebesar 40% dalam 5 tahun;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 29% dalam 5 tahun;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15% pertahun atau 75% dalam 5 tahun, dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 75% dalam 5 tahun.
 5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

2.1.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan maka diperlukan strategi pencapaian yaitu :

1. Mendayagunakan hasil rapat dan hasil koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan antar SKPD Provinsi, dengan Pemerintah Pusat/KL dan dengan Pemerintah dan SKPD Kabupaten/Kota;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUMD, sektor swasta);
3. Menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif;
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;
5. Mengembangkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM;
6. Penyusunan regulasi tentang pemberdayaan UKM;

7. Peningkatan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus perijinan (sosialisasi/bimtek);
8. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (sertifikat halal, pendaftaran HKI, temu usaha/kemitraan);
9. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (temu mitra dengan rumah kemas, Bimtek, seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing Online);
10. Memfasilitasi pelaku usaha dalam promosi dan pemasaran produk unggulan (Pameran, fasilitas gallery Khusus UKM di Pusat Perbelanjaan Modern);
11. Memfasilitasi pelaku Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan bank dan Non Bank;
12. Pendampingan bagi pelaku usaha untuk pengembangan usaha (seminar perubahan culturset, magang, bantuan peralatan);
13. Menjalani kerjasama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUMD, sektor swasta).

2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM	1. Kualitas SDM KUMKM	Persentase SDM Usaha Kecil terlatih	0,69	1,07	1,11	1,16	1,17
			Persentase SDM Koperasi terlatih	4,14	10,3	10,32	12,38	14,49
		2. Volume usaha KUMKM	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	10	10	11	11	12
			Persentase peningkatan volume usaha kecil	15	15	15	15	15
		3. Daya saing produk KUMKM	Persentase peningkatan produk usaha kecil yang tersertifikasi	1.672	243,42	133,80	133,80	133,80
			Persentase peningkatan produk usaha kecil yang dikembangkan	40	43	20	17	18
			Persentase peningkatan pelaku usaha kecil yang melakukan kemitraan	5	5,75	6,75	5,75	5,75
			Persentase peningkatan wirausaha	15	15	15	15	15
		4. Nilai tambah produk KUMKM	Pertumbuhan produk parekras	10	10	10	10	10
		5. Kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7

		Persentase koperasi berkualitas	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM					

Tabel 2.2 Formulir Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase koperasi baru	15,5%
2.	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	- Persentase UKM yang diberdayakan - Persentase Koperasi yang diberdayakan	1,4% 20%
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	- Persentase SDM KUMKM yang bersertifikat - Persentase Penerapan Mutu Pelatihan KUMKM	0,3% 0%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, masing-masing Program TA 2020 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Sasaran :

- a. Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani sebanyak 81 Orang
- b. Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran sebanyak 81 Orang
- c. Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 10 orang
- d. Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% sebanyak 2 Dokumen

2. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Sasaran :

- a. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
Output dari kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi adalah : terbentuknya Koperasi baru sebanyak 2 Unit dan tersosialisasinya tentang Peningkatan kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan bagi 30 Pengurus Koperasi.

- b. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian adalah terbentuknya ART dan Peraturan Khusus (Persus) tentang penerapan sanksi anggaran kegiatan ini adanya efisiensi anggaran (Refocussing) untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- c. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
Output dari kegiatan ini adalah Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan dilakukannya penilaian kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi yang berprestasi tingkat Provinsi.
 - Pemberian Penghargaan kepada 3 Koperasi Berprestasi dan 2 Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Sasaran :

- a. Pendampingan, Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi
Output dari kegiatan Pendampingan, Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi adalah :
- b. pelaksanaan koordinasi ke Kabupaten Bangka dan kab. Bangka Tengah dalam rangka pelaksanaan koordinasi kemitraan koperasi dan Babel Mart
- c. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi anggaran sebesar Rp 0,- adanya efisiensi anggaran (Refocussing) untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- d. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Output dari kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi adalah :
 - Terlaksananya Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang untuk Koperasi lingkup Provinsi.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

Sasaran :

- a. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
Output dari kegiatan Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil adalah :
 - 100 Produk UKM di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat yg di fasilitasi dalam Pameran Virtual di Kabupaten Bangka tepatnya di Pantai Tuing Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
 - 60 Produk UKM di kabupaten Belitung dan Belitung Timur yg di fasilitasi dalam Pameran Virtual di Kabupaten Belitung.terfasilitasinya
 - 500 Produk ukm melalui Market Place di Bukalapak

- 200 Produk UKM di Market Place Bli-Bli. Kegiatan Market Place internasional, M-
Tex Group, MNC Group, TVRI dan Lensa Babel.

- b. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
Output dari kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
adalah :
 - terfasilitasinya 200 pelaku usaha melalui sertifikasi halal, dan terlaksananya
pendataan UMKM di 47 Kecamatan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di
tuangkan dalam 1 (satu) dokumen pendataan.

- c. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Output dari kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan adalah :
 - Terseleksinya 100 calon Peserta Fasilitas Babel Academy, yang akan dilanjutkan
dengan bimbingan belajar keluar negeri.

**5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro,
kecil dan Menengah**

- a. Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM
Output dari kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan
Koperasi dan UMKM adalah :
 - jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (19 orang) dan jumlah peserta
pelatihan koperasi dan UKM yang terlayani (155 orang).
 - Kegiatan ini bersifat belanja rutin kebutuhan kantor seperti Belanja Alat Tulis
Kantor (ATK), Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja
Pengisian Ulang Air Galon, Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga, Belanja
Peralatan Kerja, Belanja Listrik, Belanja Telepon, Belanja Surat Kabar/Majalah,
Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor, perbaikan jasa instalasi
listrik, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor.

- b. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)
Output dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)
adalah :
 - 21 orang yang mengikuti pelatihan tata dan prosedur ekspor bagi pengurus dan
anggota koperasi (pelatihan daring)
 - 44 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang UKM Ekspor
 - 428 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengelolaan bisnis saat pandemi
covid-19 (pelatihan daring)
 - 29 Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan
teknis pengolahan hasil perikanan, 282 Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan bidang keterampilan usaha produktif

- 23 orang yang mengikuti pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi juru buku.

- c. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
Output dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM adalah :
 - 120 peserta pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan usaha produktif
 - 75 peserta pelatihan prasertifikasi dan uji kompetensi dewan pengawas syariah koperasi
 - 25 orang peserta pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi dewan pengawas syariah koperasi.

- d. Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi
Output dari kegiatan Peningkatan Mutu Pelatihan Perkoperasian dan UKM adalah :
 - Sertifikat Audit Surveyance dengan hasil SDM Koperasi Terlatih 10,32 % dan UKM Terlatih 1,12 % dengan mamfaat yang didapat penerapan Penerapan Mutu Pelatihan KUKM berjalan 100 %.

6. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

- a. Peningkatan Layanan Usaha Terpadu
Output dari kegiatan Peningkatan Layanan Usaha Terpadu adalah :
 - 150 Pelaku Usaha yang didampingi melalui klinik usaha terpadu dan Pengembangan sentra usaha kepada 3 kelompok Usaha.

2.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

2.2.1. Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Capaian kinerja dari indikator Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 184.999.100,- dan realisasi sebesar Rp 182.482.000,- atau 98,64% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.811.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 81.651.000,- atau 98,60%.
- b. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%.
- c. Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.187.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 97.165.900,- atau 95,09%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah sebagai berikut :

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 184.999.100 / 15,5\%) \times 15,5\%) - \text{Rp } 182.482.000 \\ &= \text{Rp. } 2.517.100,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp 2.517.100,- atau dengan Persentase 1,36%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

2.2.2 Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Capaian kinerja dari indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran sebesar Rp 152.835.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 152.834.800,- atau 99,99 %. yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.510.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.510.000,- atau 100%.
- b. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%.
- c. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.335.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 150.324.800,- atau 99,99%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 152.835.000,- / 10\%) \times 10\%) - \text{Rp } 152.834.800,- \\ &= \text{Rp. } 152.835.000,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp 200,- atau dengan Persentase 0.01%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

2.2.3 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

Capaian kinerja dari indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.980.986.010,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.440.967.870,- atau 89,15%. yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- b. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.673.400.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.644.283.470,- atau 98,91%.
- c. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.040.882.320,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.028.083.600,- atau 98,77%.
- d. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.266.703.190,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 768.600.800,- atau 60,68%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 4.980.986.010,- / 5\%) \times 5\%) - \text{Rp } 4.440.967.870,-$$

$$= \text{Rp. } 540.018.140,-$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp 540.018.140,- atau dengan Persentase 10,84%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

2.2.5. Persentase Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Capaian kinerja dari indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran sebesar Rp 3.468.411.160,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.792.733.625,- atau 80,51 %. yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada pelatihan Koperasi dan UMKM Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balatkop Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 371.979.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 333.332.840,- atau 89,61%.
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK) Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balatkop Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 2.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.832.851.700,- atau 76,37%.
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balatkop Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 628.795.160,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 563.496.585,- atau 89,62%.

- d. Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balatkop Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.637.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 63.052.500,- atau 93.22%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah sebagai berikut :

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 3.468.411.160,- / 4,13\%) \times 4,13\%) - \text{Rp } 2.792.733.625,- \\ &= \text{Rp. } 675.677.535,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp 675.677.535,- atau dengan Persentase 19,48 %. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

e. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

Ada 3 (tiga) Indikator pencapaian sasaran ditargetkan pada Tahun 2020, yaitu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase koperasi baru	15,5%	15,5%	100%
2.	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	Persentase UKM yang diberdayakan	1,4%	1,4%	100%
		Persentase koperasi yang diberdayakan	20%	20%	100%
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang bersertifikat	0,3%	0,3%	100%
		Persentase Penerapan mutu Pelatihan KUMKM	0%	0%	100%

Dari tabel di atas, dengan analisis sederhana berdasarkan pembagian terhadap persentase capaian masing-masing indikator kinerja dengan asumsi :

- a. Dinilai tidak berhasil jika capaian indikator pada range 0-25%
- b. Kurang berhasil jika capaian indikator pada range 26-60%
- c. Cukup berhasil jika jika capaian indikator pada range 61-90%, dan
- d. Berhasil jika jika capaian indikator pada range 91-100%

diperoleh gambaran bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, semua indikator yang capaiannya dalam kategori berhasil dengan persentase capaian 100%.

2.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Ada 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan pada tahun 2020, rata-rata pencapaian secara fisik mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan (data dapat dilihat pada lampiran). Rata-rata pencapaian indikator kegiatan kurang lebih 9,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah baik. Secara keseluruhan, target dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.646.200.338,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 3.046.702.827,- (mengalami pengurangan sebesar Rp 599.497.511,-) atau 16,44% dengan 4 (empat) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 3,046,702,827,- atau 98.78% dengan sisa anggaran sebesar Rp 3,009,547,300 ,- atau 1,22 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani sebanyak 81 Orang

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran sebanyak 81 Orang

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 10 Orang

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% sebanyak 2 Dokumen.

2. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

a. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi

Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.811.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 81.651.000,- atau 98,60%.

Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya Koperasi baru sebanyak 2 Unit dan tersosialisasinya tentang Peningkatan kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan bagi 30 Pengurus Koperasi.



Foto : Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)



Foto : Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)

b. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%, karena adanya efisiensi anggaran (Refocussing) untuk penanganan Pandemi Covid-19.

ini adalah tersusunnya 35 anggaran rumah tangga (ART) dan peraturan khusus (Persus)

c. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.187.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 97.165.900,- atau 95,09%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemberian Penghargaan kepada 3 Koperasi Berprestasi dan 2 Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Foto : Pemberian Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi pada saat Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Foto : Pemberian Penghargaan kepada Koperasi dan Tokoh Penggerak Koperasi Berprestasi pada saat Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.510.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.510.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi ke Kabupaten Bangka dan kab. Bangka Tengah dalam rangka pelaksanaan koordinasi kemitraan koperasi dan Babel Mart.

	
<p>Foto : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi ke Kabupaten Bangka</p>	<p>Foto : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi ke Kabupaten Bangka</p>

a. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%, karena adanya efisiensi anggaran (Refocussing) untuk penanganan Pandemi Covid-19

c. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.335.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp150.324.800,- atau 99,99%.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang.

	
<p>Foto : Melaksanakan pembinaan terhadap Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Foto : Melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi di Kabupaten Bangka Selatan</p>

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

a. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.673.400.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.644.283470,- atau 98,91%.

Keluaran kegiatan ini adalah 100 Produk UKM di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat yg di fasilitasi dalam Pameran Virtual di Kabupaten Bangka tepatnya di Pantai Tuing Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan 60 Produk UKM dikabupaten Belitung dan Belitung Timur yg di fasilitasi dalam Pameran Virtual di Kabupaten Belitung.terfasilitasinya 500 Produk ukm melalui Market Place di Bukalapak dan 200 Produk UKM di Market Place Bli-Bli. Kegiatan Market Place internasional, M-TeX Group,MNC Group,TVRI dan Lensa Babel.



b. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.040.882.320,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp 1.028.083.600,- atau 98,77%.

Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya 200 pelaku usaha melalui sertifikasi halal, dan terlaksananya pendataan UMKM di 47 Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di tuangkan dalam 1 (satu) dokumen pendataan.



c. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.266.703.190,- dan realisasi anggaran sebesar Rp768.600.800,- atau 60,68%.

Keluaran kegiatan ini adalah Terseleksinya 100 calon Peserta Fasilitas Babel Academy, yang akan dilanjutkan dengan bimbingan belajar keluar negeri.



5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM

Kegiatan dilaksanakan oleh Balatkop dan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 371.979.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 333.332.840,- atau 89,61%.

Keluaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (19 orang) dan jumlah peserta pelatihan koperasi dan UKM yang terlayani (155 orang). Kegiatan ini bersifat belanja rutin kebutuhan kantor seperti Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Pengisian Ulang Air Galon, Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga, Belanja Peralatan Kerja, Belanja Listrik, Belanja Telepon, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor, perbaikan jasa instalasi listrik, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor.



b. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh Balatkop dan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 2.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.832.851.700,- atau 76,37%.

Keluaran kegiatan ini adalah 21 orang yang mengikuti pelatihan tata dan prosedur ekspor bagi pengurus dan anggota koperasi (pelatihan daring), 44 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang UKM Ekspor, 428 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengelolaan bisnis saat pandemi covid-19 (pelatihan daring), 29 Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan teknis pengolahan hasil perikanan, 282 Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan usaha produktif, dan 23 orang yang mengikuti pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi juru buku.



a. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (APBD)

Kegiatan dilaksanakan oleh Balatkop UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka dengan alokasi anggaran sebesar Rp.628.795.160,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.563.496.585,- atau 89.62%. Keluaran kegiatan ini adalah 120 peserta pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan usaha produktif, 75 peserta pelatihan prasertifikasi dan uji kompetensi dewan pengawas syariah koperasi, dan 25 orang peserta pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi dewan pengawas syariah koperasi.



Foto : Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bidang Keterampilan Usaha Produktif angkatan 4



Foto : Pelatihan Kewirausahaan Bidang Keterampilan Usaha Produktif angkatan 4

b. Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelatihan Perkoperasian dan UKM yang dilaksanakan oleh UPTD Balai latihan Koperasi UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.637.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp63.052.500,- atau 93.22%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 Sertifikat Audit Surveillance dengan hasil SDM Koperasi Terlatih 10,32 % dan UKM Terlatih 1,12 % dengan mamfaat yang didapat penerapan Penerapan Mutu Pelatihan KUKM berjalan 100 %



Foto : Audit sertifikat surveillance ISO 9001:2015 yang dilaksanakan oleh PT. AQC Sertifikasi Indonesia



Foto : pemeriksaan terhadap ruang belajar terhadap manajemen mutu sertifikat ISO 9001:2015 yang dilaksanakan oleh PT. AQC Sertifikasi Indonesia

6. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

a. Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.507.146.480,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.435.851.300,- atau 95,27%.

Keluaran kegiatan ini adalah 150 Pelaku Usaha yang didampingi melalui klinik usaha terpadu dan Pengembagna sentra usaha kepada 3 kelompok Usaha.

Untuk bantuan alat pendukung produksi bagi UMKM melalui dana DID (Dana Insentif Daerah) tambahan 2020.



Foto : Bimtek Peningkatan Produktifitas dan daya saing Kerajinan Tangan Daun Mengkuang di Desa Delas



Foto : Bimtek Pemanfaatan Aplikasi Keuangan bagi Koperasi

2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan program sebanyak 6 (enam) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja langsung pada APBD induk sebesar Rp 10.679.998.005,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 13.341.080.577,- (penambahan sebesar Rp 2.661.082.572,-). Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar Rp 12.011.381.795,- atau 90,03% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.329.698.782,- atau 9,70%. Alokasi belanja tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp 6.256.458.185,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp 6.869.179.469,- (mengalami penambahan sebesar Rp 612.739.284,-) dengan realisasi sebesar Rp 6.620.500.612,- atau 96,38% dengan sisa anggaran Rp 248.696.857,- atau 3,62%. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.800.000 atau 6,85%.

Rincian realisasi pendapatan dan belanja keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD Induk	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI PENDAPATAN	
					KEUANGAN (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	170.000.000,00	100,00	24.800.000,00	14,58
1	Retribusi Daerah	0,00	170.000.000,00	100,00	24.800.000,00	14,58

2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD Induk	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.256.458.185	6.869.197.469	100	6.620.500.612	96.38	248.696.857	3.62
A	GAJI DAN TUNJANGAN	3.470.075.892	3.337.291.186	100.00	3.183.293.667	0,95	153.997.519	0,05
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.786.382.293	3531.906.281	100.00	3.437.206.945	97,32	94.699.336	13,68

3. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA	16.936.456.190	20,210,278,046	100	18,631,882,407	92.19	1,578,395,639	7.81
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.256.458.185	6,869,197,469	100	6,620,500,612	96.38	248,696,857	3.62
II	BELANJA LANGSUNG	10.679.998.005	13,341,080,577	100	12,011,381,795	90.03	1,329,698,782	9.97
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3,646,200,338	3,046,702,827	100	3,010,177,300	98.80	36,525,527	1.20
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,916,535,078	2,886,330,047	100	2,855,425,950	98.93	30,904,097	1.07
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504,050,000	103,346,430	100	100,350,000	97.10	2,996,430	2.90
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118,100,000	-	100	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107,515,260	57,026,350	100	54,401,350	95.40	2,625,000	4.60
B	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	453,788,510	184,999,100	100	178,816,900	96.66	6,182,200	3.34
1	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	153,009,930	82,811,800	100	81,651,000	98.60	1,160,800	1.40
2	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	134,960,280	-	100	-	-	-	-
	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	165,818,300	102,187,300	100	97,165,900	95.09	5,021,400	4.91
C	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	739,062,370	152,835,000	100	152,834,800	100.00	200	0.00
1	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	235,006,740	2,510,000	100	2,510,000	100.00	-	-
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	134,193,970	-	100	-	-	-	-
3	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	369,861,660	150,325,000	100	150,324,800	100.00	200	0.00
D	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	3,013,139,267	4,980,986,010	100	4,440,967,870	89.16	540,018,140	10.84
1	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	541,202,447	2,673,400,500	100	2,644,283,470	98.91	29,117,030	1.09
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	976,782,320	1,040,882,320	100	1,028,083,600	98.77	12,798,720	1.23
3	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	1,495,154,500	1,266,703,190	100	768,600,800	60.68	498,102,390	39.32

E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2,009,506,540	3,468,411,160	100	2,792,733,625	80.52	675,677,535	19.48
1	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	1,118,615,000	371,979,000	100	333,332,840	89.61	38,646,160	10.39
2	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	-	2,400,000,000	100	1,832,851,700	76.37	567,148,300	23.63
3	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	732,776,160	628,795,160	100	563,496,585	89.62	65,298,575	10.38
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi dan UKM	158,115,380	67,637,000	100	63,052,500	93.22	4,584,500	6.78
F	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	818,300,980	1,507,146,480	100	1,435,851,300	95.27	71,295,180	4.73

d. ANALISIS KINERJA

1. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari Pandemi Covid -19
- b. Rasionalisasi anggaran (refocussing anggaran) yang dilakukan menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.
- c. Beberapa pelatihan dilaksanakan serara daring/ online sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
- d. Untuk kegiatan dari Dana Insentif Daerah (DID) dan perubahan Anggaran Tahu 2020 waktu pelaksanaan terlalu sempit pada pertengahan bulan Oktober karena revisi anggaran baru disahkan pada triwulan ke 3.
- e. Penetapan SK KPA dan pelaksana kegiatan yang sedikit terlambat dikarenakan ada perubahan personil kegiatan.
- f. Keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian juga menyebabkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dirumuskan beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain :

- a. Untuk tahun anggaran berikutnya dibuat anggaran kas untuk setiap kegiatan dan dibahas pada awal bulan untuk mengetahui serapan anggaran/kegiatan dipertimbangkan secara matang untuk rasionalisasi anggaran agar pencapaian target kinerja bisa tercapai
- b. Untuk usulan peserta pelatihan sebaiknya sudah diterima 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan agar Panitia/PPTK dapat memverifikasi kualifikasi peserta yang diusulkan.

- c. Untuk kegiatan baru atau kegiatan yang direvisi melalui APBD Perubahan sebaiknya persiapan pelaksanaan kegiatan hendaknya dimulai pada triwulan ke III, sehingga pada saat anggaran sudah disahkan, kegiatan langsung bisa dilaksanakan.
- d. Agar sejak awal tahun anggaran SK KPA dan pelaksana kegiatan sudah ditetapkan.
- e. Petunjuk teknis kegiatan diharapkan sudah siap sejak awal tahun anggaran sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

2.5 PRESTASI KERJA

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun anggaran 2020 berkat kerja keras dan kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait (Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan LSM).

Prestasi kerja tingkat Nasional yang diraih ditahun 2020 diantaranya:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pameran virtual UMKM di pesisir Pantai Tuing, Riau Silip, Kabupaten Bangka, pameran virtual di luar ruangan dengan menggunakan tali tambang terpanjang dan berhasil memecahkan rekor MURI.
2. Ekspor Lidi Nipah Perdana ke Nepal dan Pakistan, pelepasan ekspor lidi nipah dan lada putih dengan pengguntingan pita oleh Menteri Koperasi dan UKM RI dan Gubernur Bangka Belitung.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada DPA tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, yakni :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan ada beberapa yang capaian indikatornya melebihi 100%. Keberhasilan tersebut karena didukung oleh Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota untuk menyukseskan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, juga dengan instansi terkait seperti Pemda / Dinas / Lembaga Provinsi, Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi dan LSM.

Indikator sasaran yang telah dicapai, belum seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada beberapa indikator yang belum tercapai secara maksimal, hal ini akan diupayakan secara maksimal untuk di raih pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Ir. Hj. ELFIYENA

Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

